

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Penyusunan LAKIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

LAKIP tahun 2025 ini disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,


Endri, AP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19750821 199412 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaa, kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
7. Pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

C. Struktur Organisasi

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**, terdiri dari atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- 4. Bidang Promosi Penanaman Modal**
- 5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal**
- 6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
- 7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial:**
- 8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi**
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional**

D. Isu Strategis SKPD

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global, mengalami perlambatan ekonomi
2. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
3. Kalsel sebagai Gerbang Ibukota Negara
4. Hilirisasi Industri
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Perizinan dan Nonperizinan

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.
2. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
2. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
3. Belum optimalnya promosi investasi;
4. Ketidakmerataan penanaman modal;
5. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
6. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Menuju pelayanan prima;
8. Terbatasnya sumber daya manusia;
9. sarana dan prasarana belum optimal;
10. sistem informasi pelayanan belum optimal;

Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya promosi investasi- Belum teridentifikasinya data potensi daerah- Ketidakmerataan penanaman modal- Pelayanan belum optimal- Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM.- Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota- Sinkronisasi Perencanaan- Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;	<ul style="list-style-type: none">- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan- Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan- Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan- Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi- Kesiapan kelembagaan penanaman modal- Kesiapan aparatur pemerintah yang berkomitmen

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAKIP, dapat disesuaikan sebagaimana contoh berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi urusan yang ditangani.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2024, dan Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan)

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 :

1. Pembangunan Manusia yang unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
2. Pembangunan Infrastruktur yang handal
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata dan Syariah
4. Penguatan ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
5. Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat

Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 mengacu pada **Misi II dan Misi IV**.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:

Visi
"KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan)



Misi III
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata dan Syariah

Misi V
Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat



Tujuan
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran
Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah

Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Publik



Indikator
Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
<p>Kondisi 1) Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014), titik terendah pada 3,84% (2015 2.) Investasi di kalsel tahun 2014 mengalami penurunan, terutama di sektor tambang 3) Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan</p> <p>Isu 1) Belum optimalnya investasi di Kalsel 2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan</p>	<p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi • Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan <p>Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah • Meningkatnya Pelayanan Publik <p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pemberian Fasilitas di Bidang Penanaman Modal • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :: <ol style="list-style-type: none"> a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2. Program Promosi Penanaman Modal <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3. Program Pelayanan Penanaman Modal <ol style="list-style-type: none"> b) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <ol style="list-style-type: none"> a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal <ol style="list-style-type: none"> b) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Kinerja Utama	Indikator	Target
Kepala Dinas	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	13,52 Trilyun Rupiah
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.75)
Sekretaris	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP DPMPTSP	A (83)
		Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%
		Persentase Aset yang tercatat	100%
	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Admiministrasiu Perkantoran Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%
	Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%
	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Persentase Surat Menyurat, Surat Keluar dan Arsip yang dikelola	100%

		Persentase Urusan Pemenuhan Rumah Tangga	100%
		Persentase Pemenuhan Bahan Analisa dan Evaluasi Organisasi dan Ketatalaksanaan	100%
		Persentase Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara Tertib	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan SKPD	Jumlah Dokumentasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen
	Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat	1 Dokumen
Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28
		Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14
		Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen
	Terlaksananya Pengelolaan Aset SKPD	Persentase Aset yang dikelola	100%
Kabid Perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%
		Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%
		Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%
	Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen
		Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100%
	Pengembangan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan dunia usaha	4 Kemitraan
Kabid Promosi Penanaman	Peningkatan Calon Investor	Persentase peningkatan Calon Investor	30%

Modal		Persentase promosi yang ditindaklanjuti	25%
	Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	Persentase Potensi Investasi daerah yang diminati	50%
		Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, telah ditetapkan 5 (lima) program prioritas urusan penanaman modal beserta Indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir		
				2021		2022		2023		2024		2025			2026	
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)		Target	(Juta. Rp)
Urusan Penanaman Modal																
Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp	7.76 T	12.715 T	1.640	11.66 T	1.968	12.55T	2.362	13.52 T	2.834	14.55 T	3.401	15.67T	4.082	15.67T
Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	A (88.35)	A 88)	350	A(88.25)	1.500	A (88.50)	1.861	A (88.75)	1.952	A(89)	2.343	A (89.25)	2.821	A (89.25)

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	12.715	11.66	12.55	13.52	14.55	15.67	15.67

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- a. *Lebih dari 90%* untuk kategori capaian **Sangat Memuaskan**;
- b. *80% s/d 90%* untuk kategori capaian **Memuaskan**;
- c. *70% s/d 80%* untuk kategori capaian **Sangat Baik**;
- d. *60% s/d 70%* untuk kategori capaian **Baik**;
- e. *Diatas 50% s/d 60%* untuk kategori capaian **Cukup**;
- f. Kurang dari 50% untuk kategori capaian **Kurang**;

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Investasi yang Berdampak ke Daerah• Meningkatkan Pelayanan Publik	Peningkatan Investasi dengan indikator : 1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *ouput* yang dapat diukur dalam jangka

pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Peningkatan Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan 2 (dua) indikator yakni: Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi investasi PMA dan PMDN dengan capaian tahun 2024 **183.80 %** masuk dalam klarifikasi **Memuaskan**. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian **105.07%** juga masuk dalam klarifikasi **sangat memuaskan**.

2. Esselon II (Kepala Dinas)

Terdapat 2 (dua) Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Esselon II) yakni:

- a. Peningkatan Investasi dengan indikator : Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) kinerja utama dan 2 (dua) indikator dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	13.520.000.000.000	24.850.000.000.000	183.80%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya.	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel, BKPM RI
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.75)	A (93.25)	105.07%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					144.44%		

Penjelasan :

Pada Kinerja Peningkatan Investasi dengan indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN, tahun 2023 ditargetkan sebesar 13.52 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **13,72 triliun rupiah** sehingga capaian kinerja sebesar **101.48%**.

Rumus indikator realisasi investasi PMA dan PMDN yaitu Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya.

Pada Kinerja kedua yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan A dengan nilai 88.50. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 94.25**, sehingga kinerja mencapai **106.50%**.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- Pembagian kuesioner kepada pelanggan

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2023 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2023 dan % capaian	Target 2024 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Target 2024 Realisasi TW III 2024 (sesuai RPJMD dan Renstra)
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	13.520.000.000.000	19.760.000.000.000 (146.15%)	13.520.000.000.000	24.850.000.000.000 (183.80%)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.50)	A (94.25) 106.50%	A (88.75)	A (93.25) 105.07%

Penjelasan

Indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan nilai 88.25 dengan predikat A sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017. Sedangkan Tahun 2023 dengan nilai A (88.50) Adapun unsur penilaian sebagai berikut:

- Persyaratan
- Kompetensi Pelaksana
- Prosedur
- Perilaku pelaksana
- Waktu pelayanan
- Sarana dan prasarana
- Biaya/tarif
- Penanganan pengaduan dan masyarakat
- Produk Layanan

b. Perbandingan kinerja sesuai RPJMD dan Renstra

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
TARGET RPJMD KALSEL (RENSTRA DPMPSTP PROV. KALSEL):																			
- Realisasi Investasi (Rp.Triliun)	7.76	10.83	12.71	117.41%	11.66	15.29	131.18%	12.55	19.76	146.15%	13.52	24.85	183.80%	14.55	-	-	15.67	-	-
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.35)	B (85)	A(88)	TERCAPAI	A (88.25)	A (88.75)	TERCAPAI	A (88.50)	A (94.25)	TERCAPAI	A (88.75)	A (93.25)	105.07%	A (89)	-	-	A (89.25)	-	-

c. Perbandingan Realisasi kinerja tingkat Regional dan Nasional

Kalimantan Selatan		Kalimantan Barat		Kalimantan Tengah		Kalimantan Timur		Kalimantan Utara	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13.52	24.85	21.84	24.65	23.83	21.51	76.02	77.14	15	32.14
Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah	Trilyun Rupiah

d. Target SDGs

Nama Indikator	Program	Satuan	Target Pencapaian				
			100	100	100	100	100
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persen	20	25	30	35	40
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persen	30	32	36	40	42
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Poin	88,25	88,5	88,75	89	89,25
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persen	35	40	45	50	50
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2024, target yang telah ditetapkan diperkirakan akan tercapai. Hal ini dikarenakan situasi yang sudah mulai normal pasca pandemic covid 19.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, *one-one meeting*, dan lainnya.
6. *Matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
12. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

✓ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk melaporkan LKPM
- Adanya perubahan system dari oss 1.1 ke oss RBA, sehingga mengalami kendala untuk menarik data rencana investasi perusahaan
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target investasi masing-masing yang telah diberikan
- Adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPTSP Kab/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi

✓ Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi dengan PIC di masing-masing Kab/Kota terkait pencapaian realisasi investasi untuk TA 2024
- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama satgas percepatan pelaksanaan berusaha Prov Kalsel
- Melaksanakan Bimteks OSS RBA dan Bimtek implementasi pengawasan perizinan berubah
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk pendataan rencana investasi perusahaan penanaman modal.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target **13.52** triliun rupiah, sasaran RPJMD sama dengan capaian kinerja eselon II.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar 24.85 triliun rupiah atau 183.80% dari target tahun 2023 sebesar 13.52 Trilyun. Realisasi investasi mengalami peningkatan.

Disisi lain, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator pengukur kepuasan masyarakat yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

tahun 2023 sebesar 88.50 dengan predikat A, sedangkan tahun 2024 A 88.75 sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga *Front Officer*
7. Tersedianya *Help Desk*
8. Implementasi perizinan secara *online* dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan *Online Single Submission (OSS)*
9. *Digital Signature* untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015

4) Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:

i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

v. Pengadaan Barang Milik Daerah

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
- vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal
 - b) Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
 - ii. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - a) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 - b) Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
- i. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

- III. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Pengawasan Penanaman Modal
 - b) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - c) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Esselon III (Sekretaris)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET DAN CAPAIAN			CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN		
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (83)	A 84.25	101.51%	Persentase Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	88.74%	104.40%	Persentase serapan anggaran SOPD	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Aset yang tercatat	100%	100%	100.00%	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%)	Dinas PM dan PTSP
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80%	100.00%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100.00%	100.00%	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	Dinas PM dan PTSP
3	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%	100%	100.00%	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	Dinas PM dan PTSP

Penjelasan

1. Indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu 84.25 yang merupakan penilaian dari beberapa komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.
2. Indikator Persentase Penyerapan Anggaran SKPD yaitu 88.74%
3. Indikator persentase aset yang tercatat yaitu 100% (seluruh aset tercatat)
4. Indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD yaitu 80%
5. Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian yaitu 100%

6. Indikator Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham yaitu 100%

- Bimtek Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Bimbingan Teknis tentang “Penerapan TKDN Dalam Meningkatkan Produk dalam Negeri”
- Pelatihan Training OF Trainer (TOT) Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)

Kinerja Sekretaris Dinas (esselon III) dengan 6 (enam) indikator menghasilkan rata-rata capaian 100.98% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR	2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (83)	A 83.30	A (83)	A (84,25)
2.	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	85.72	85%	88,74%
3.	Persentase Aset yang tercatat	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80%	80%	80%
5.	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100,00%
6.	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%	100%	100%	100,00%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditargetkan A dengan nilai 83 dan terealisasi **A dengan nilai 84.25**, sehingga kinerja mencapai **101.51%**.

Indikator Kedua Persentase Penyerapan Anggaran SKPD ditargetkan 85% dengan terealisasi , sehingga kinerja mencapai 88.74%

Indikator Ketiga Persentase Aset yang tercatat ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ditargetkan 80% dengan terealisasi 80% sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian
1	Nilai SAKIP DPMPTSP	A (83)	A 83.30 (100.36%)	A (83)	A (84,25) 101.51%
2	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100%	100% (100.00%)	85%	88,74% (104.40%)
3	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80% (100.00%)	80%	80% (100%)
4	Persentase Peserta Pelatihan/ Bimtek yang paham	100%	100% (100.00%)	100%	100% (100%)
5	Persentase Aset yang tercatat	100%	100% (100.00%)	100%	100% (100%)

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian
6	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	85.72% 100.85%	85%	88.74% 104.40%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditargetkan A dengan nilai 83 dan terealisasi **A dengan nilai 88.74**, sehingga kinerja mencapai **104.40%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD ditargetkan 80% dan terealisasi **80%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Keempat yaitu Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ditargetkan 80% dan terealisasi **80%**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Kelima yaitu Persentase Peserta Pelatihan/ Bimtek yang paham ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Keenam yaitu Persentase Aset yang tercatat ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketujuh yaitu **88.74%** yaitu Persentase Penyerapan Anggaran SKPD sehingga kinerja mencapai **104.40%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyusunan anggaran

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran.

4) Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

v. Pengadaan Barang Milik Daerah

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1) Esselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%	100%	100%	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga	100%	100%	100%	Jumlah dokumentasi Urusan Pemenuhan Rumah Tangga	Dinas PM dan PTSP
		Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	100%	100.00%	100.00%	Jumlah dokumentasi bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	100%	100.00%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	Dinas PM dan PTSP
2	Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan SKPD	Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen terkait penyediaan sarana dan prasarana	Dinas PM dan PTSP
3	Tersedianya dokumen kebutuhan diklat	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	Dinas PM dan PTSP

Penjelasan :

- Indikator jumlah dokumen pelayanan surat menyurat adalah surat keluar dan arsip yang dikelola 100% teragendanya surat masuk dan surat keluar
- Indikator Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga yaitu terpenuhinya air, listrik, internet dan ATK
- Indikator Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan yaitu Penyusunan Draft Tupoksi dan SOTK Baru

- Indikator jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana adalah tersedianya dokumen Pengadaan Barang dan jasa sesuai yang teranggarkan dan direalisasikan
 - Indikator jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib adalah menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi kenaikan gaji berkala, Pembuatan KARIS/KARSU dan surat ijin cuti, Kenaikan pangkat, usul pensiun, Usul penerima tanda penghargaan satyalencana karya satya
 - Indikator jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat yaitu Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bimbingan Teknis Tentang “Penerapan TKDN Dalam meningkatkan Produk dalam Negeri, Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)
- Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100.% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 6 (enam) indikator.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2023	2024		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketiga yaitu Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Keempat yaitu Jumlah Dokumentasi penyediaan sarama dan prasarana ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Kelima yaitu Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Keenam yaitu Jumlah dokumen kebutuhan diklat ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian
1.	Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%	100% 100%	100%	100% 100%
2.	Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga	100%	100% 100%	100%	100% 100%
3.	Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi	100%	100% 100%	100%	100% 100%

	organisasi dan ketatalaksanaan				
4.	Persentase Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	100% 100%	100%	100% 100%
5.	Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	1 Dokumen	1 Dokumen 100%
6.	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	1 Dokumen	1 Dokumen 100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola yaitu 2023 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.sedangkan pada tahun 2024 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Urusan Pemenuhan Rumah Tangga pada 2023 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.sedangkan pada tahun 2024 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.

Indikator Ketiga yaitu Persentase pemenuhan bahan Analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan pada tahun 2023 terealisasi **100% dengan capaian 100%**. sedangkan pada tahun 2024 terealisasi **100% dengan capaian 100%**

Indikator Keempat yaitu Persentase Pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib, pada tahun 2023 terealisasi **100% dengan capaian 100.00%**, sedangkan pada tahun 2024 **100% dengan capaian 100%**

Indikator kelima yaitu Jumlah dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana pada tahun 2023 terealisasi **1 dokumen** dengan capaian **100.00%** , sedangkan pada tahun 2024 **1 dokumen** dengan capaian **100%**

Indikator Keenam yaitu jumlah dokumen kebutuhan diklat, pada tahun 2023 terealisasi **100% dengan capaian 100.00%**, sedangkan pada tahun 2024 **100% dengan capaian 100%**

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya –upaya yang telah dilakukan

- Melakukan penertiban format perumusan surat keluar/surat masuk di tiap bidang dan sekretariat kantor
- Melakukan penertiban format perumusan surat izin/kode surat izin dibidang perizinan
- Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana kantor khususnya dibagian pelayanan
- Merekap segala urusan administrasi seluruh pegawai kantor

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Pengarsipan surat menyurat dan dokumen perizinan yang belum terorganisir
- Ruang sarana pengarsipan surat/dokumen yang belum memadai
- Anggaran pelatihan/bimtek yang terbatas sehingga belum bisa mengakomodir kebutuhan pelatihan/bimtek kantor

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengatur dan mengorganisir mulai dari masuk surat sampai kepada pengarsipannya
- Mengajukan anggaran ditahun berikutnya untuk rehab/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dikantor

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Esselon IV (Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	25.39	90.68%	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD	Dinas PM dan PTSP
		Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	12,69	90.64%	Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	Dinas PM dan PTSP
2	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	Dinas PM dan PTSP
3	Terlaksananya Pengelolaan Aset SKPD	Persentase aset yang dikelola	100%	100%	100,00%	Jumlah Aset yang dikelola	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					96.26%		

Penjelasan :

Indikator Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP yaitu 25.39

Indikator Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP yaitu 12.69

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan 6 Dokumen yaitu Penyusunan LKPJ/LPPD, Penyusunan Renja Perubahan, Penyusunan Renja 2025, Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Laporan tahunan dan Penyusunan Renstra

Indikator jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen tersedianya laporan keuangan DPMPTSP Prov Kalsel Tahun anggaran 2024.

Indikator Persentase aset yang dikelola 100% yaitu

Belanja Peralatan Studio Audio (Sound System)	Meja Kerja Partisi
Kamera Digital	Kursi Rapat
Televisi	Smartphone
Drone	Interactive Plat Panel Display
Tablet PC	Monitor
Notebook	Scanner
Printer	Laptop
Lemari Kaca	PC Unit
Sofa	Kursi Kerja
Kursi Kerja	

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 96.26% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2023	2024		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	25.50	28	25.39	90.68%
2.	Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	12.30	14	12.69	90.64%
3.	Jumlah Dokumen Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%

	sesuai Ketentuan				
4	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5	Persentase Aset yang dikelola	100%	100%	100%	100,00%

Penjelasan :

Indikator nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2023 nilai 28 terealisasi 25.50 sehingga kinerja mencapai 91.07%

Indikator nilai Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2023 nilai 14 terealisasi 12.30 sehingga kinerja mencapai 87.86%

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan ditargetkan tahun 2023 6 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2023 1 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase aset yang dikelola tahun 2023 ditargetkan 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	28,94 103,36%	28	25,50 91,07%

2	Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	14,10 100,71%	14	12,30 87.86%
3.	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen 100.00%	6 Dokumen	6 Dokumen 100.00%
4.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen 100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen 100.00%
5.	Persentase aset yang dikelola	100%	100% 100.00%	100%	100% 100.00%

Penjelasan :

Indikator nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2024 nilai 28 terealisasi 25.39 sehingga kinerja mencapai 91.07%

Indikator nilai Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2024 nilai 14 terealisasi 12.69 sehingga kinerja mencapai 87.86%

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan ditargetkan tahun 2024 6 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2024 1 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase aset yang dikelola tahun 2024 ditargetkan 100% sehingga kinerja mencapai 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran

- Koordinasi intensif dengan Bappeda, Bakeuda, Biro Organisasi, dan Inspektorat

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Pemahaman terkait indicator kinerja oleh stakeholder masih belum maksimal

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran
- Koordinasi terkait indicator kinerja dengan Biro Organisasi

3) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- e) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- (i) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (ii) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- (i) Pengadaan Mebel
- (ii) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Esselon III (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100%	100%	Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kemitraan dibagi Jumlah Kemitraan Dunia Usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100%	100%	Jumlah Potensi Investasi daerah yang dapat dipromosikan dibagi Jumlah Potensi Investasi di 13 Kab/Kota x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20%	100%	Jumlah Potensi Investasi yang Berbasis Lingkungan dibagi Jumlah Potensi Investasi x 100%	Dinas PM dan PTSP
	Identifikasi Potensi dan Kebijakan Investasi	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan dibagi seluruh potensi investasi yang ada di Kalsel x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 % (8 sektor)	100 % (8 sektor)	100%	Jumlah Realisasi Sektor Investasi dibagi Jumlah sektor Investasi pada RUPM x 100%	Dinas PM dan PTSP
	Fasilitasi Dunia Usaha dengan Perusahaan PM	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100%	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,00.0%		

Penjelasan :

- a. Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan yaitu 8/8 kemitraan (100%) sehingga capaian nya 100%

Perusahaan Besar	UMKM
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Hj Najmi Atus Saadah, S.Pd UKM
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Sukma HSI Sasirangan
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Jamilah Fanesya Sasirangan

Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Jamilah Fanesya Sasirangan
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel Dr Hj Rosally Gunawan	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan Pipih
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Fuad Hasan Sasirangan
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan Pipih
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Rusimah Dodol Madu Kasiran Raisa
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Ridhawaty Hilma Sasirangan

b. Persentase Potensi Investasi Dipromosikan dengan capaian 100%

<ul style="list-style-type: none"> • PLTA Kusan Tanah Bumbu • Pemotongan Hewan Modern • Geopark Gunung Meratus • KEK Pariwisata Loksado • Pembangunan Sport City

c. Persentase Potensi investasi yang berbasis lingkungan yaitu 100% sehingga capaian nya 100%

<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Ekowisata Suaka Margasatwa Kuala Lupak
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Peternakan Sapi

d. Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan yaitu 1 dokumen sehingga capaiannya 100% yaitu tersedianya 1 dokumen potensi investasi berbasis lingkungan

e. Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi yaitu target 100% sehingga capaiannya 100% yaitu

<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pariwisata • Sektor Pangan • Sektor Infrastruktur dan Sosial • Sektor Energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Industri • Sektor Perdagangan • Sektor UMKM • Sektor Jasa
--	---

f. Jumlah Kemitraan Dunia Usaha yaitu target 4 Kemitraan sehingga capaiannya 100% yaitu :

- Widia Safitri Sasirangan Pewarna Alam
- Siti Jaleha Kue kering Abon Ikan Tenggeri

- Nur Ulfah Sasirangan Kotabaru

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 6 (enam) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2023	2024		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20%	20%	100%
4.	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100% (8 Sektor)	100% (8 Sektor)	100% (8 Sektor)	100%
6.	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100%

Penjelasan :

- Indikator Pertama Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan pada tahun 2023 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**, sedangkan tahun 2024 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**
- Indikator Kedua yaitu Persentase Potensi Investasi dipromosikan pada tahun tahun 2023 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**, **sedangkan** tahun 2024 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**
- Indikator Ketiga yaitu Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan pada tahun 2023 ditargetkan 20% dan terealisasi 20% sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan tahun 2024 ditargetkan **20%** dan terealisasi **20%** sehingga kinerja mencapai **100%**

- d. Indikator keempat yaitu Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan ditargetkan **1 dokumen** dan terealisasi **1 dokumen** sehingga kinerja mencapai **100%**
- e. Indikator Kelima Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**
- f. Indikator Jumlah Kemitraan Dunia Usaha ditargetkan **4 Kemitraan** dan terealisasi **4 Kemitraan** sehingga kinerja mencapai **100%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian
1.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100% 100%	100%	100% 100%
2.	Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100% 100%	100%	100% 100%
3.	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20% 100%	20%	20% 100%
4.	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	1 Dokumen	1 Dokumen 100%
5.	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100%	100% 100%	100%	100% 100%
6.	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan 100%	4 Kemitraan	4 Kemitraan 100%

Penjelasan :

Indikator Pertama Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan pada tahun 2022 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2023		2024	
Perusahaan Besar	UMKM	Perusahaan Besar	UMKM
		BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Hj Najmi Atus Saadah, S.Pd UKM
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Jamilah Fanesya Sasirangan	BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Sukma HSI Sasirangan
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel Dr Hj Rosally Gunawan	Jamilah Fanesya Sasirangan	Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Jamilah Fanesya Sasirangan
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan Pipih Berdikari	BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Jamilah Fanesya Sasirangan
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Fuad Hasan Sasirangan	Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan Pipih
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	Fuad Hasan Sasirangan	BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	Fuad Hasan Sasirangan

Kalsel Dr Hj Rosally Gunawan		Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Rusimah Dodol Madu Kasirat Raisa	BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan Pipih
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Esti Sapto Rini Banana Smoke D'Jajanan	Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Rusimah Dodol Madu Kasiran Raisa
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Siti Jaleha Kue Kering Abon Ikan Tenggiri	BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Ridhawaty Hilma Sasirangan

Indikator Persentase Potensi Investasi dipromosikan pada tahun 2023 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2024 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> • Cabe Hiyung • Ikan Gabus • PLTA Kusan Tanah Bumbu • Hotel Aerocity Banjarbaru • Pemotongan Hewan Modern Banjarbaru 	<ul style="list-style-type: none"> • PLTA Kusan Tanah Bumbu • Pemotongan Hewan Modern • Geopark Gunung Meratus • KEK Pariwisata • Pembangunan Sport City

Indikator Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan pada tahun 2023 ditargetkan 20% dan terealisasi 20% sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan tahun 2024 ditargetkan 20% dan terealisasi 20% tersedianya 1 Dokumen potensi investasi berbasis lingkungan

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Jejangkit Ecopark 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Ekowisata suaka Margasatwa Kuala Lupak

<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Curiak Mangrove Riset Bekantan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan peternakan sapi
--	--

Indikator Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi tahun 2023 ditarget 100% terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan tahun 2024 ditarget 100% terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pariwisata • Sektor Pangan • Sektor Infrastruktur dan Sosial • Sektor Energi • Sektor Industri • Sektor Perdagangan • Sektor UMKM • Sektor Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pariwisata • Sektor Pangan • Sektor Infrastruktur dan Sosial • Sektor Energi • Sektor Industri • Sektor Perdagangan • Sektor UMKM • Sektor Jasa

Indikator Jumlah Kemitraan dunia usaha tahun 2023 ditarget 100% terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan tahun 2024 ditarget 100% terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> • Dian Lia Ramayani : Dian Lia Sasirangan pewarna alam • Nurmaina Kuliner : pewarna alam kerupuk udang/haruan • Karlina kacang mandai • Sri ika apriliana : gallery skariliana 	<ul style="list-style-type: none"> • Widia Safitri Sasirangan Pewarna Alam • Siti Jaleha Kue Kering Abon Ikan Tenggiri • Nur Ulfah Sasirangan Kotabaru • Erina Sasirangan Padang Panjang

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Terlaksananya Kemitraan dunia usaha antara pengusaha besar dengan UMKM se Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
- Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan dengan Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota se Kalsel mengenai potensi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Minimnya data potensi investasi di Kabupaten/Kota yang ada di Kalsel
- Kurangnya keterlibatan dan pemahaman dari DPMPTSP Kabupaten/Kota terkait fasilitasi kemitraan UMKM dengan pengusaha besar
- Terbatasnya dana yang tersedia sehingga membuat terbatasnya kegiatan dan koordinasi dengan pusat maupun daerah

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan supervisi dan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota tentang fasilitasi kemitraan dunia usaha
- Menambahkan anggaran untuk kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim PM
- Melakukan monitoring/evaluasi baik tentang pelaksanaan kemitraan maupun pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi investasi di Kalimantan Selatan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

5. Esselon III (Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Calon Investor	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	30%	100%	Pertumbuhan Calon Investor = (Jumlah calon investor tahun beqjalan dikurang jumlah calon investor tahun lalu) dibagi jumlah calon investor tahun lalu x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	25%	100%	Promosi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah promosi an dilaksanakan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
	Teridentifikasi Promosi Investasi	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item	100%	Jumlah Item Media Promosi Investasi	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali	100%	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
	Terlaksananya Promosi Investasi	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	50%	100%	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang Diminati dibagi Jumlah Potensi Investasi yang Dipromosikan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali	100%	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					100,00%		

Penjelasan :

- Indikator Persentase peningkatan Calon Investor ditargetkan 100% terealisasi 100%
PT Guang Yin New

- Indikator Persentase Promosi yang ditindaklanjuti di targetkan 25% terealisasi 25% yaitu :

- | | |
|---|-------------------------|
| ✓ | PLTA Kusan Tanah Bumbu |
| ✓ | Pemotongan Hewan Modern |
| ✓ | KEK Pariwisata Loksado |
| ✓ | Pembangunan Sport City |
| ✓ | Geopark Gunung Meratus |

- Indikator Jumlah item media promosi ditargetkan 6 item terealisasi 6 item yaitu

- | | |
|---|----------------------|
| ✓ | Buku Potensi Potensi |
| ✓ | Rakor |
| ✓ | Brosur |
| ✓ | Booklet |
| ✓ | Roll Banner |
| ✓ | Kalender |

- Indikator Jumlah pelaksanaan kegiatan seminar bisnis, forum, one on meeting ditargetkan 3 kali terealisasi 3 kali yaitu

- ✓ Pameran Promosi Investasi Indonesia Tourism Trade Investment Expo 2024 di DIY Yogyakarta
- ✓ Pameran Promosi Investasi Indonesia Tourism Trade Investment Expo 2024 di Jawa Tengah
- ✓ Kalsel Expo 2024

- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting

- ✓ Door to Door ke KADIN Jakarta
- ✓ Door to Door ke HIPMI Jakarta
- ✓ High Level Meeting di Banjarmasin

- Persentase potensi investasi daerah yang diminati

✓	PLTA Kusan Tanah Bumbu
✓	Pemotongan Hewan Modern
✓	KEK Pariwisata Loksado
✓	Pembangunan Sport City
✓	Geopark Gunung Meratus

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2023	2024		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	30%	30%	100%
2.	Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	25%	25%	100%
3	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item	6 Item	100%
4	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%
5	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	50%	50%	100%
6	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%

Penjelasan :

Indikator Persentase peningkatan calon investor Tahun 2023 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2024 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100%.

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Grieya Sharia Hospitality ✓ PT MSSF ✓ PT Indraco ✓ PT TBL ✓ Tilaks ✓ PT Kalla Group 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Guang Yin New

Indikator Persentase Promosi yang ditindaklanjuti Tahun 2023 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2024 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100%.

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cabe Hiyung Tapin ✓ Ikan Gabus Hulu Sungai Selatan ✓ PLTA Kusan Tanah Bumbu ✓ Hotel Aerocity Banjarbaru ✓ Pemotongan Hewan Modern ✓ Waste to Energy Basirih ✓ Kawasan Industri Jorong ✓ Pembuatan Hewan dan Penggemukan sapi di Batola ✓ Pembuatan Hewan dan peternakan sapi di Tanah Laut 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PLTA Kusan Tanah Bumbu ✓ Pemotongan Hewan Modern ✓ KEK Pariwisata Loksado ✓ Pembangunan Sport City ✓ Geopark Gunung Meratus

Indikator Jumlah item Media promosi investasi Tahun 2023 di targetkan 6 item terealisasi 6 item sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2024 di targetkan 6 item terealisasi 6 item sehingga capaian 100%.

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Brousur ✓ Booklet ✓ Buku ✓ Video ✓ IPRO Kajian ✓ Rakor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buku ✓ Rakor ✓ Brosur ✓ Booklet ✓ Roll Banner ✓ Kalender

Indikator Jumlah pelaksanaan kegiatan seminar bisnis, forum, one on meeting di targetkan 3 kali terealisasi 3 kali sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2023 di targetkan 3 kali terealisasi sehingga capaian 100%.

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ High Level Meeting di Jakarta ✓ High Level Meeting di Jakarta ✓ High Level Meeting di Banjarmasin 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Door to Door ke KADIN Jakarta ✓ Door to Door ke HIPMI Jakarta ✓ High Level Meeting di Banjarmasin

Indikator Persentase potensi investasi daerah yang diminati di targetkan 50% terealisasi 50% sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2024 di targetkan 50% terealisasi 50% sehingga capaian 100%.

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cabe Hiyung Tapin ✓ Ikan Gabus Hulu Sungai Selatan ✓ PLTA Kusan Tanah Bumbu ✓ Hotel Aerocity Banjarbaru ✓ Pemotongan Hewan Modern ✓ Waste to Energy Basirih ✓ Kawasan Industri Jorong ✓ Pembuatan Hewan dan Penggemukan sapi di Batola ✓ Pembuatan Hewan dan peternakan sapi di Tanah Laut 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PLTA Kusan Tanah Bumbu ✓ Pemotongan Hewan Modern ✓ KEK Pariwisata Loksado ✓ Pembangunan Sport City ✓ Geopark Gunung Meratus

Indikator Jumlah pelaksanaan promosi investasi di targetkan 3 kali terealisasi 3 kali sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2024 di targetkan 3 kali terealisasi 3 kali sehingga capaian 100%.

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Batam Tourism and Trade Investment Expo 2023 ✓ Kalsel Expo 2023 ✓ Bali ITTAF 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pameran Promosi Investasi Indonesia Tourism Trade Investment Expo 2024 di DIY Yogyakarta ✓ Pameran Promosi Investasi Indonesia Tourism Trade Investment Expo 2024 di Jawa Tengah ✓ Kalsel Expo 2024 di Banjarbaru

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian
1.	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	30% 100%	30%	30% 100%
2	Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	25% 100%	25%	25% 100%
3	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item 100%	6 Item	6 Item 100%
4	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali 100%	3 Kali	3 Kali 100%
5	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	50% 100%	50%	50% 100%
6	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali 100%	3 Kali	3 Kali 100%

Penjelasan :

Persentase Peningkatan Calon Investor ditargetkan **30%** terealisasi **30%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Persentase Promosi yang ditindaklanjuti ditargetkan **25%** terealisasi **25%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Jumlah Item Media Promosi Investasi ditargetkan **6 item** terealisasi **6 item** sehingga kinerja mencapai **100%**

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting ditargetkan **3 Kali** terealisasi 3 Kali sehingga kinerja mencapai **100%**.

Persentase Potensi investasi daerah yang diminati ditargetkan **50%** terealisasi 50% sehingga kinerja mencapai **100%**.

Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi ditargetkan **3 Kali** terealisasi 3 Kali sehingga kinerja mencapai **100%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pameran, media promosi investasi dan melaksanakan seminar bisnis, forum, one on one meeting
- Meningkatkan kapasitas potensi menjadi ready to offer
- Menyamakan persepsi Kab/Kota terhadap potensi yang potensial untuk dipromosikan dan juga menyamakan persepsi indikator potensi yang ready to offer

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- SDM yang memiliki kapabilitas memadai
- Pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM masih terbatas
- Alokasi anggaran yang masih terbatas

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan
- Peningkatan urusan alokasi anggaran
- Pelaksanaan promosi investasi agar ditambah kegiatannya agar bias menarik calon investor baik dari penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

6. Esselon III (Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang Terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perusahaan yang aktif (diawasi/diamati/diketahui) dibagi jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang ada di Kalsel x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
		Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	35,00%	35,00%	102,00%	Jumlah penyelesaian permasalahan perusahaan dibagi jumlah permasalahan perusahaan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
		Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai target	55.00%	46.15%	83.91%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Investasi Provinsi dibagi 13 Memenuhi Target Kabupaten/Kota x 100%	Dinas PM dan PTSP
	Pengawasan PM	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	350 Perusahaan	110%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	Dinas PM dan PTSP
		Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
	Pembinaan PM	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	400 Perusahaan	410 Perusahaan	102.50%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Dinas PM dan PTSP

		dengan valid tepat waktu					
		Persentase Kabupaten/K ota yang telah mengimplem entasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	100%	100%	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah mengimplemen tasikan Kebijakan penanaman Modal x 100%	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					98.36%		

Penjelasan :

- 1) Indikator persentase permasalahan perusahaan yang terselesaikan adalah sebesar 100% yaitu 49 Perusahaan yang terdata dan yang telah diselesaikan, berdasarkan data pers rilis yang berdasarkan hasil tindak lanjut perusahaan
- 2) Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya yaitu hingga bulan ini 410 perusahaan (41.00%), berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara tatap muka/online
- 3) Persentase kabupaten/Kota yang mencapai target yaitu yang mencapai target Tahun 2024 46.19 % :
 - Kota Banjarmasin
 - Kabupaten Tapin
 - Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - Kabupaten Kotabaru
 - Kabupaten Balangan
- 4) Jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi Perusahaan) yaitu 330 Perusahaan
- 5) Laporan Realisasi penanaman modal yaitu 1 dokumen tersedianya dokumen realisasi investasi penanaman modal
- 6) Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu yaitu 410 Perusahaam

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah **102,90%** dengan klarifikasi **Sangat Memuaskan**, dengan 7 (tujuh) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2023	2024		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100.00%	100%	100.00%	100.00%
2.	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	35.70%	35%	41.00%	117.14%
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	55.00%	55%	46.15%	92.31%
4	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakannya (sesuai target investasi perusahaan)	330 Perusahaan	300 Perusahaan	310 Perusahaan	103.33%
5	Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
6	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	410 Perusahaan	400 Perusahaan	405 Perusahaan	101.25%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	100%	100%	100%

Penjelasan :

Indikator Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 50% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **200,00%**, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya pada tahun 2020 ditargetkan **24%** dan terealisasi **25.76%** sehingga kinerja mencapai **107.33%**. sedangkan tahun 2020 ditargetkan **30%** dan terealisasi **32.40%** sehingga kinerja mencapai **108.00%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100%	100.00% 100,00%
2	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	30%	41.00% 117.14%
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	55.00	55.00% 100%
4	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	330 Perusahaan 110%
5	Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen 100%
6	Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	400 Perusahaan	410 Perusahaan 102.5%

Penjelasan :

Indikator Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan pada tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100,00%**, sedangkan tahun 2023 ditargetkan **100%** dan teralisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya pada tahun 2022 ditargetkan **35%** dan terealisasi **35.70%** sehingga kinerja mencapai **102.00%**. sedangkan tahun 2023 ditargetkan **35%** dan terealisasi **41.00%** sehingga kinerja mencapai **117.14%**

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target pada tahun 2022 ditargetkan 55% terealisasi 55.00% sehingga kinerja mencapai 100.00%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan **55%** dan terealisasi **55.00%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target Perusahaan) ditargetkan 300 Perusahaan terealisasi 330 Perusahaan sehingga kinerja mencapai 110.00%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 300 Perusahaan terealisasi 330 Perusahaan sehingga kinerja mencapai 110.00%,

Indikator Laporan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2022 ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 Dokumen sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 Dokumen sehingga kinerja mencapai 100%.

Indikator Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu Tahun 2022 ditargetkan 400 Perusahaan terealisasi 410 Perusahaan sehingga kinerja mencapai 102.50%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 400 Perusahaan terealisasi 410 Perusahaan sehingga kinerja mencapai 102.50%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Membagi PIC untuk Kab/Kota dalam mengkoordinasi target investasi , perusahaan-perusahaan dan pelatihan LKPM
- Mengirimkan email sebagai pengingat/reminder penyampaian LKPM per triwulan
- Melakukan pembinaan/pelatihan LKPM kepada perusahaan melalui telepon/WA
- Melakukan fasilitasi permasalahan perusahaan melalui zoom meeting

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM
- Adanya perubahan system dari oss 1.1 ke oss RBA, sehingga mengalami kendala untuk menarik data rencana investasi perusahaan
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target investasi masing-masing yang telah diberikan
- Adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPSTSP Kab/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasidengan PIC dimasing-masing Kab/Kota terkait pencapaian realisasi investasi untuk TA 2022
- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama satgas percepatan pelaksanaan berusaha Prov Kalsel
- Melaksanakan Bimteks OSS RBA dan Bimtek impelemntasi pengawasan perizinan berubah
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk pendataan rencana investasi perusahaan penanaman modal.

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021:

- 1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

7. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan infrastruktur dan Sosial)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (88.50)	A (90.25)	101.98%	Nilai IKM Bidang Infrastruktur dan Sosial	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Permohonan yang dilayani Bidang Infrastruktur dan Sosial	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Persentase Usaha Berizin	90%	99.65	110.72%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dapat diproses	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonpeiznan BidangInfrastruktur dan Sosial yang dilayani	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
Rata-rata Capaian					102,54%		

Penjelasan :

- a. Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan infrastruktur dan sosial dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang perizinan sarana perekonomian dan sosial yaitu dengan nilai IKM 90.25 kategori (sangat baik) sebanyak 377 Responden
- b. Indikator persentase permohonan yang dilayani yaitu pelayanan perizinan bidang infrastruktur dan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau

penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 287 berkas dan dilaksanakan sejumlah 287 berkas sehingga terealisasi capaian 100%.

- c. Indikator Persentase usaha berizin bidang Infrastruktur dan sosial yaitu 99.65%
- d. Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dapat diproses yaitu 100%
- e. Indikator Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani yaitu 55 jenis izin

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 102,54% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (89,84)	A (88.50)	A (90.25)	101,98%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Permohonan yang dilayani Bidang Infrastruktur dan sosial	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Usaha Berizin Bidang Infrastruktur dan sosial	99.19%	90%	99.65%	110.72%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin	100%	100%

	dan Sosial yang dilayani				
--	--------------------------	--	--	--	--

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial tahun 2022 ditargetkan B dengan nilai 88.25 dan terealisasi **A dengan nilai 89,44** sehingga kinerja mencapai 99.43% dari 93 responden, sedangkan tahun 2023 ditargetkan A dengan nilai 88.50 dan terealisasi **A dengan nilai 90,25** sehingga kinerja mencapai 106,70% dari 377 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 257 berkas dan dilaksanakan sejumlah 257 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%** dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 377 berkas

Persentase Usaha Berizin tahun 2022 ditargetkan pada tahun itu, sedangkan tahun 2023 terealisasi 99.19% dengan capaian 110.21% terdiri dari 10.823 izin dari 10.911 usaha, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 90.00% terealisasi 99.65% dengan capaian 110.72%.

Persentase pemenuhan pelayanan (Dokumen Permohonan) perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial yang dapat diproses yaitu ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%

Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial ditargetkan 55 Jenis izin terealisasi 55 Jenis izin dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 55 Jenis izin terealisasi 55 Jenis izin dengan capaian 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	B (88.25)	A (87.75) 99.43%	A (88.50)	A (90.25) 101.98%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	100% 100%	100%	100% 100%
3.	Persentase Permohonan yang dilayani Bidang Infrastruktur dan sosial	100%	100%	100%	100% 100%
4.	Persentase Usaha Berizin Bidang Infrastruktur dan sosial	90%	99.19% 110.21%	90%	99.19 110.72%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial tahun 2022 ditargetkan B dengan nilai 88.25 dan terealisasi **A dengan nilai 89,44** sehingga kinerja mencapai 99.43% dari 93 responden, sedangkan tahun 2023 ditargetkan A dengan nilai 88.50 dan terealisasi **A dengan nilai 90,25** sehingga kinerja mencapai 106,70% dari 377 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk

sebanyak 257 berkas dan dilaksanakan sejumlah 257 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%** dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 377 berkas

Persentase Usaha Berizin tahun 2022 ditargetkan pada tahun itu, sedangkan tahun 2023 terealisasi 99.19% dengan capaian 110.21% terdiri dari 10.823 izin dari 10.911 usaha, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 90.00% terealisasi 99.65% dengan capaian 110.72%.

Persentase pemenuhan pelayanan (Dokumen Permohonan) perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial yang dapat diproses yaitu ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%

Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial ditargetkan 55 Jenis izin terealisasi 55 Jenis izin dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 55 Jenis izin terealisasi 55 Jenis izin dengan capaian 100%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang perizinan infrastruktur dan social sesuai ketentuan
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi
- Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Instansi teknis terkait

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Perizinan yang melalui OSS masih proses penyempurnaan
- SDM OPD teknis/mitra kerja kurang memahami OSS RBA

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengikuti TOT dan Sosialisasi untuk penyempurnaan OSS RBA menunggu pusat sambil berjalan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yakni: Program Pelayanan penanaman Modal kegiatan .

- a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

8. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.50)	A (97,75)	110,45%	Nilai IKM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Usaha Berizin Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90%	99.88%	110.98%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dapat diproses Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90 Jenis Izin	90 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonpeiznan BidangInfrastruktur dan Sosial yang dilayani	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
Rata-rata Capaian					104,29%		

Penjelasan

- Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Ekonomi dan Sumber daya alam dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPSTSP Prov Kalsel untuk bidang Produksi dan Industri sebanyak 732 responden yaitu dengan nilai IKM 97.75 kategori (sangat baik)
- Indikator Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani yaitu pelayanan perizinan bidang Ekonomi dan sumber daya alam telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan

yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 831 berkas dan dilaksanakan sejumlah 831 berkas sehingga terealisasi capaian 100%.

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 104,29% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.50)	A (88.50)	A (97,75)	110,45%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP	100%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Usaha Berizin	99.88%	90%	99.88%	110.98%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani	90 Jenis Izin	90 Jenis Izin	90 Jenis Izin	100,00%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya tahun 2022 ditargetkan A dengan nilai 88.25 dan terealisasi A dengan nilai 88.50 sehingga kinerja mencapai 100,28% yaitu sebanyak 319 responden. Sedangkan tahun 2023 ditargetkan A dengan nilai 88.50 dan terealisasi A dengan nilai 97.75 sehingga kinerja mencapai 110.45% yaitu sebanyak 732 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 319 berkas dan dilaksanakan sejumlah 319 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2023 Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 732 berkas dan dilaksanakan sejumlah 732 berkas sehingga terealisasi capaian 100%,

Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 831 berkas dan dilaksanakan sejumlah 831 berkas sehingga terealisasi capaian 100%

Persentase usaha berizin ditargetkan 90% dan terealisasi **99.88%**, yaitu dimana izin terbit dibagi jumlah permohonan (usaha yang ada) terdiri sehingga terealisasi capaian 110.98%

Persentase pemenuhan pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yaitu 100% total berkas masuk 831 dan diproses sebanyak 831 dokumen permohonan bidang peternakan, dokumen permohonan bidang kehutanan, dan dokumen permohonan bidang energi sumber daya alam

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.25)	A (88.50) 100,28%	A (88.50)	A (97.75) 110.45%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai	100%	100% 100%	100%	100% 100%

	SOP				
3.	Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	100%	100% 100%	100%	100% 100%
4.	Persentase Usaha Berizin	90%	99.88% 110.98%	90%	99.88% 110.98%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya tahun 2022 ditargetkan A dengan nilai 88.25 dan terealisasi A dengan nilai 88.50 sehingga kinerja mencapai 100,28% yaitu sebanyak 319 responden. Sedangkan tahun 2023 ditargetkan A dengan nilai 88.50 dan terealisasi A dengan nilai 97.75 sehingga kinerja mencapai 110.45% yaitu sebanyak 732 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 319 berkas dan dilaksanakan sejumlah 319 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2023 Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 732 berkas dan dilaksanakan sejumlah 732 berkas sehingga terealisasi capaian 100%,

Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 831 berkas dan dilaksanakan sejumlah 831 berkas sehingga terealisasi capaian 100%

Persentase usaha berizin ditargetkan 90% dan terealisasi **99.88%**, yaitu dimana izin terbit dibagi jumlah permohonan (usaha yang ada) terdiri sehingga terealisasi capaian 110.98%

Persentase pemenuhan pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yaitu 100% total berkas masuk 831 dan diproses sebanyak 831 dokumen permohonan bidang peternakan, dokumen permohonan bidang kehutanan, dan dokumen permohonan bidang energi sumber daya alam

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Pelaksanaan gerai perizinan
- Peninjauan Lapangan
- Koordinasi yang intens dengan Tim teknis
- Konsultasi dan konsolidasi ke Kemnterian Pusat di Jakarta

3.2 Hambatan dan Pencapaian Kinerja

- Banyak pelaku usaha / pemohon ijin yang belum paham tentang OSS RBA
- Kurangnya sosialisasi tentang OSS RBA
- OSS RBA terus berkembang baik itu fitur maupun menu-menunya
- Jaringan yang tidak mendukung
- SDM yang belum ada bekal ilmu yang cukup tentang OSS RBA
- DPMPTSP, Tim Teknis juga masih tahap belajar / mempelajari system OSS RBA
- Masih banyak aplikasi diluar OSS yang dpakai contoh : Dinas perindustrian Aplikasi SINAS, Dinas Kelautan dan Perikanan Aplikasi SIMKADA, BPN Prov Kalsel aplikasi GISTARU
- Adanya dinas teknis tidak tahu adanya kewenangan Provinsi
- Ada beberapa Dinas teknis yang belum mempunyai SOP

3.3 Rencana Tindak lanjut

- Adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke daerah tentang OSS RBA
- SDM yang tersedia sudah paham tentang OSS RBA
- Adanya sosialisasi tentang OSS RBA ke pelaku usaha /pemohon lain

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2023, yakni: Program Pelayanan Penanaman Modal dan kegiatan :

a) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

9. Esselon III (Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Pengaduan dan Informasi	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.50)	A (94.70)	107.01%	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	3 Sistem	3 Sistem	100%	Jumlah Sistem Informasi yang berjalan Dinas PM dan PTSP dengan lancar dan Data Informasi yang Update	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
3.	Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Pemenuhan pelayanan investor	100%	100%	100%	Pelaksanaan misi dibagi misi yang masuk x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	Tersedianya data perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					101,30%		

Penjelasan :

- a. Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi yaitu dengan nilai IKM 94.70 kategori (sangat baik)
- b. Jumlah sistem informasi yang berjalan dengan lancar ditargetkan 3 sistem yaitu Web, SIMAPAN, Social Media
- c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% yaitu
 - Kontak (17)

Total Pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 17 pengaduan dan diselesaikan sebanyak 17 (100%)
- d. Persentase pemenuhan pelayanan investor ditargetkan 100 % yaitu
 - Berkah Bumi Bersholawat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - CV Hasanah Borneo Kabupaten Banjar
 - CV Alamansyur Mutiara Wisata Kabupaten Hulu Sungai Utara

e. Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi ditargetkan yaitu 100%

✓ Tatap Muka (302)

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 101.30% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2023	2024		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.53)	A (88.50)	A (94.70)	100.03%
2.	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	3 Sistem	3 Sistem	3 Sistem	100%
3.	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	100%

Penjelasan :

- Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Tahun 2023 yaitu dengan nilai IKM 88.53 kategori (sangat baik), sebanyak 31 Responden. Sedangkan Tahun 2024 dengan nilai IKM 94.70 kategori (sangat baik).
- Jumlah sistem informasi yang berjalan dengan lancar dan data informasi yang update yaitu

2023	2024
✓ WEB	✓ WEB
✓ SIMAPAN	✓ SIMAPAN
✓ Social Media	✓ Social Media

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu tahun 2023 ada 31 pengaduan dan diselesaikan sedangkan tahun 2024 17 pengaduan

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Whatsup Pengaduan (30) ✓ Email (1) Total 31 Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontak (17) Total 17 Pengaduan

- Persentase Pemenuhan Pelayanan Investor Tahun 2022 100% yaitu

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Wijaya Triutama Banjarmasin ✓ PT Rajawali Nusindo Banjarmasin ✓ PT Sari Buana Lestari Banjarmasin ✓ PT Cakra Perkara Jaya Mulia Tabalong ✓ PT Mulia Jaya Tabalong ✓ PT Ananda Rizqi Tabalong ✓ PT Banua Anugrah Sejahtera Kabupaten Banjar ✓ CV Kuat Perkasa Abadi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berkah Bumi Bersholawat Kabupaten Hulu Sungai Tengah ✓ CV Hasanah Borneo Kabupaten Banjar ✓ CV Alamansyur Mutiara Wisata Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Persentase pemenuhan Konsultasi yaitu 100%

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Online (15) ✓ Tatap Muka (1.046) ✓ Total Pelayanan Konsultasi 1.051 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tatap Muka (302) Total Pelayanan Konsultasi 302

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian
1	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.50)	A (88.53) 100.03%	A (88.75)	A (94.70) 107.01%
2	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	2 Sistem	2 Sistem 100%	3 Sistem	3 Sistem 100%
3	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100% 100%	100%	100% 100%
4	Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100% 100%	100%	100% 100%
5	Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100% 100%	100%	100% 100%

Penjelasan :

- Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPSTSP Prov Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Tahun 2023 yaitu dengan nilai IKM 88.50
- Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update Tahun 2023 ditargetkan 2 sistem terealisasi 2 sistem dengan capaian

100%, sedangkan Tahun 2024 ditargetkan 3 sistem terealisasi 3 sistem dengan capaian 100%

- Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan Tahun 2024 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%
- Persentase Pemenuhan pelayanan Investor Tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan Tahun 2024 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%
- Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan Tahun 2024 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang transparan, professional, terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Sarana dan prasarana dan SDM

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengadakan forum fasilitasi perusahaan
- Mengadakan forum konsultasi publik
- Melakukan pendampingan terhadap masyarakat/pihak terkait dalam penyelenggaraan pemohon terpadu perizinan dan non perizinan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu:

- a) Penanaman modal yang menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan Menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- b) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS	Pagu SIPD 2024	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase
UNSUR WAJIB PENANAMAN MODAL				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.024.119.987	20.431.088.166	2.593.031.821,00	88,74%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.743.093.087	12.999.286.080	1.743.807.007,00	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	946.252.200	776.320.115	169.932.085,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	645.570.700	585.044.455	60.526.245,00	90,62%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.681.500	191.275.660	109.405.840,00	63,61%
Administrasi Keuangan	7.533.905.100	7.126.809.009	407.096.091,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.231.086.700	6.930.465.060	300.621.640,00	95,84%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.008.100	134.061.200	13.946.900,00	90,58%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	154.810.300	62.282.749	92.527.551,00	40,23%
Administrasi Kepegawaian	898.614.000	783.880.232	114.733.768,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	761.622.000	671.109.232	90.512.768,00	88,12%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.401.000	6.815.000	14.586.000,00	31,84%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.591.000	23.666.000	7.925.000,00	74,91%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.000.000	82.290.000	1.710.000,00	97,96%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.121.871.100	901.341.684	220.529.416,00	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.768.500	55.947.500	7.821.000,00	87,74%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.698.700	153.555.300	10.143.400,00	93,80%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.654.900	15.500.000	5.154.900,00	75,04%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.614.000	46.474.000	9.140.000,00	83,57%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	139.512.000	137.005.800	2.506.200,00	98,20%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.623.000	492.859.084	185.763.916,00	72,63%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.608.450.000	997.400.000	611.050.000,00	
Pengadaan Mebel	156.300.000	152.100.000	4.200.000,00	97,31%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.452.150.000	845.300.000	606.850.000,00	58,21%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.512.272	948.133.023	161.379.249,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.935.000	13.500.000	2.435.000,00	84,72%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	497.500.000	360.652.223	136.847.777,00	72,49%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.077.272	573.980.800	22.096.472,00	96,29%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.524.488.415	1.465.402.017	59.086.398,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	638.652.000	637.735.345	916.655,00	99,86%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	669.506.415	648.836.672	20.669.743,00	96,91%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.330.000	178.830.000	37.500.000,00	82,67%

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah	-	-	0,00	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	-	-	0,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (Bidang Renbang)	1.525.924.600	1.345.565.580	180.359.020,00	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	426.829.100	309.624.680	117.204.420,00	
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	304.944.800	249.349.680	55.595.120,00	81,77%
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	121.884.300	60.275.000	61.609.300,00	49,45%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.099.095.500	1.035.940.900	63.154.600,00	
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	127.923.300	66.535.000	61.388.300,00	52,01%
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	971.172.200	969.405.900	1.766.300,00	99,82%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Bidang Promosi)	2.263.166.400	2.183.260.600	79.905.800,00	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.263.166.400	2.183.260.600	79.905.800,00	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	266.857.000	220.580.600	46.276.400,00	82,66%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.996.309.400	1.962.680.000	33.629.400,00	98,32%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.248.573.200	1.952.152.749	296.420.451,00	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.248.573.200	1.952.152.749	296.420.451,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.108.456.800	865.099.709	243.357.091,00	78,05%
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	941.733.400	912.233.740	29.499.660,00	96,87%

Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	198.383.000	174.819.300	23.563.700,00	88,12%
PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL (Bidang Dalak)	1.169.494.700	979.978.350	189.516.350,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.169.494.700	979.978.350	189.516.350,00	
Pengawasan Penanaman Modal	641.977.100	592.463.050	49.514.050,00	92,29%
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	110.127.600	49.598.050	60.529.550,00	45,04%
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	417.390.000	337.917.250	79.472.750,00	80,96%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (Bidang Pekdi)	1.073.868.000	970.844.607	103.023.393,00	
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1.073.868.000	970.844.607	103.023.393,00	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.073.868.000	970.844.607	103.023.393,00	90,41%
TOTAL	23.024.119.987	20.431.088.166	2.593.031.821,00	

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

NO	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi	Persentase
1.	Peningkatan Investasi	Program Pengembangan iklim penanaman Modal Program promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Rp4.958.585.700	Rp4.508.804.530	90.92%
2.	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Program pelayanan penanaman modal Program Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Rp3.322.441.200	Rp2.922.997.356.	87.97%
3.	Peningkatan Nilai SAKIP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp14.743.093.087	Rp12.999.286.080	88.17%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.087.756.472
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	552.438.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	310.054.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.384.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.071.814.492
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.832.548.692
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.981.300
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.284.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.808.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.644.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.520.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.644.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.564.197.700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.390.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.775.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	454.365.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.170.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	139.512.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	787.985.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	611.800.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	554.770.000

Pengadaan Mebel	850,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.180.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.117.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.735.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	538.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	530.382.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.096.580.080
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502.522.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.098.080
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.960.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	738.260.200
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	300.211.700
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	224.050.500
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	76.161.200
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	438.048.500
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	16.135.600
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	421.912.900
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.365.464.800
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.365.464.800
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	818.098.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	547.366.800
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.194.497.200
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.194.497.200
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	550.628.200
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	18.366.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	79.778.500

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	545.724.500
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	942.598.400
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	942.598.400
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	82.187.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	593.254.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	267.156.400
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	643.671.000
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	643.671.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	643.671.000
TOTAL	17.972.248.072

2024

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS		Pagu SIPD 2024
UNSUR WAJIB PENANAMAN MODAL		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		23.024.119.987
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		14.743.093.087
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		946.252.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		645.570.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		300.681.500
Administrasi Keuangan		7.533.905.100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.231.086.700
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		148.008.100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		154.810.300
Administrasi Kepegawaian		898.614.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		761.622.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		21.401.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		31.591.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		84.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.121.871.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		63.768.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		163.698.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20.654.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		55.614.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		139.512.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		678.623.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.608.450.000
Pengadaan Mebel	156.300.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.452.150.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.512.272
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.935.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	497.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.077.272
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.524.488.415
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	638.652.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	669.506.415
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.330.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah	-
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	-
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (Bidang Renbang)	1.525.924.600
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	426.829.100
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	304.944.800
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	121.884.300
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.099.095.500
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	127.923.300
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	971.172.200
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Bidang Promosi)	2.263.166.400
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.263.166.400
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	266.857.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.996.309.400
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.248.573.200
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.248.573.200

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.108.456.800
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	941.733.400
Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	198.383.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL (Bidang Dalak)	1.169.494.700
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.169.494.700
Pengawasan Penanaman Modal	641.977.100
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	110.127.600
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	417.390.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (Bidang Pekdi)	1.073.868.000
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1.073.868.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.073.868.000
TOTAL	23.024.119.987

No	2023		2024	
1.	Belanja Operasi	Rp.15.360.448.072	Belanja Operasi	Rp.21.240.669.987
2.	Belanja Modal	Rp.611.800.000	Belanja Modal	Rp.1.783.450.000
	Total	Rp.17.972.248.072	Total	Rp.23.024.119.987

b) DEKONSENTRASI

Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)

1. Dasar Hukum
DIPA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)
Nomor 065.01..3.159002/2021
2. Instansi Dekonsentrasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)
3. Program dan Kegiatan
Program Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp217.791.180,00 atau 66.52 persen dari anggaran belanja sebesar Rp322.874.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

URAIAN	2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	322,874,000	214,791,180	66.52 %
Total Belanja Kotor	322,874,000	214,791,180	66.52 %
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	322,874,000	214,791,180	66.52 %

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang diturunkan BKPM RI kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk mengawasi perusahaan baik PMA maupun PMDN yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 1 Lembaga, adapun pelaksanaannya DPMPTSP dapat merealisasikan sebanyak 21 Proyek sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

1. Dasar Hukum

DIPA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 010.04.3.484172/2021

2. Instansi Dekonsentrasi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)

3. Program dan Kegiatan

Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp35,861,000 atau 70.19 persen dari anggaran belanja sebesar Rp51.088.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang diturunkan KEMENDAGRI RI kepada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2024 Identifikasi dan inventarisasi data penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Kab/Kota se Kalsel dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan dan merealisasikan 1 Rekomendasi Kebijakan capaian kinerja 100%.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

URAIAN	2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	51,088,000	35,861,000	70.19 %
Total Belanja Kotor	51,088,000	35,861,000	70.19 %
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	51,088,000	35,861,000	70.19 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2023 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023. Dengan demikian di dalam LAKIP Tahun 2024 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun capaian realisasi investasi sebesar 134.10%, sedangkan capaian nilai IKM sebesar 105.07%. Dapat disimpulkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi ***sangat memuaskan***.

B. Solusi Mengatasi Kendala untuk Peningkatan Kinerja Mendatang

Disamping itu, dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut::

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.
5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
8. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2021-2026 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.